

ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP OUTCOMES PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta)

Noval Akhmad Huda, Hadi Sasana¹

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

Fiscal decentralization was held since 2001 is purpose to give more capacity of public service that government do for people. This research is purpose to see the effect of fiscal decentralization to outcomes of public service in education sector. This research path analysis that use output variable as intervening and want to see the direct and in direct effect of fiscal decentralization to outcomes of education sector. And finally it can take the better policy to repair the result of public service from the output until the outcome.

This research use panel data from six city and residence in Jakarta in 2006 until 2010. The method to get the result of this research is use path analysis approach to find the direct and in direct effect of fiscal decentralization to output and outcome of education sector of public service.

The result of this research shows that fiscal decentralization have better effect for outcome of education sector of public service in that direct effect. Fiscal decentralization has positive effect to graduation rate in high school and vocational school. If fiscal decentralization increase one percent graduation rate rise up to 0.008 percent, but graduation rate have no significant effect for outcomes of education. Fiscal decentralization has positive effect in level of drop out of high school and vocational school, if fiscal decentralization increase one percent drop out level will be increase 0.547 percent, so fiscal decentralization not give better effect in drop out level yet as expected.

Key word: fiscal decentralization, output of education sector, outcome of education sector, path analysis.

PENDAHULUAN

. Desentralisasi fiskal merupakan paket kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanannya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam tingkat yang terkecil sekalipun dari tingkat provinsi sampai desa. Oleh karena itu pemerintahan Indonesia yang semula bersifat sentralistik diubah sistemnya menjadi desentralistik karena pada prinsipnya pemerintah daerahlah yang lebih mengerti kondisi masyarakat yang ada di daerah, dan aspirasi-aspirasi masyarakatpun akan cepat tertangani apabila proses birokrasinya dipotong hingga tataran daerah, agar proses penyerapan aspirasi dan penyediaan pelayanan publik dapat berlangsung dengan cepat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang SISDIKNAS 2003 dimana pendidikan merupakan hak setiap warga untuk memperolehnya. Bila di lihat pada capaian pendidikan berupa tingkat partisipasi sekolah dimana pada tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan masih sebesar 60% dimana angka tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pada kondisi tingkat putus sekolah tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Undang-undang sistem pendidikan dasar yang mengamanatkan 20% alokasi belanja daerah untuk sektor pendidikan belum dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pencapaian pada *outcomes* bidang pendidikan.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap capaian *outcomes* pendidikan berupa angka partisipasi sekolah dan angka putus sekolah, selain itu juga akan melihat pengaruh langsung dan tidak langsung desentralisasi fiskal terhadap *outcomes* pendidikan melalui variabel output yang menjadi mediator terhadap variabel *outcomes*.

¹ Penulis penanggungjawab

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Menurut teori desentralisasi fiskal bahwasannya dengan di terapkannya desentralisasi fiskal tersebut maka kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi semakin besar, karena proses pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pusat ke daerah berdasarkan pada undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Beberapa penelitian mengatakan bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dan pengalokasian anggaran, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat dengan baik di sediakan oleh pemerintah. Namun dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa desentralisasi fiskal yang dapat meningkatkan efisiensi anggaran itu hanya berjalan pada negara-negara yang telah maju. Sedangkan dalam kasus negara-negara berkembang hal tersebut belum terjadi dengan baik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membuktikan argumen mengenai desentralisasi di Negara berkembang tersebut. Dengan membandingkan besar pengeluaran pemerintah bidang pembangunan terhadap output dan *outcomes* bidang pelayanan publik. Apakah terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal dengan *outcomes* bidang pelayanan publik tersebut. Dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini terlihat adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pengeluaran pemerintah bidang pembangunan dan *outcomes* pada bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain bahwa adanya desentralisasi fiskal ini meningkatkan kinerja alokasi anggaran bidang pelayanan publik ini. Sehingga peneliti ingin membuktikan bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal di Jakarta terhadap kondisi pelayanan publik pada bidang pendidikan.

Hubungan Desentralisasi Fiskal Dengan *Outcomes* Bidang Pendidikan

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jean-Paul Faguet dan Fabio Sánchez (2006) menemukan hasil dimana terdapat pengaruh antara jumlah belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap *outcomes* bidang pendidikan yakni angka partisipasi sekolah. Yang mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah yang di keluarkan oleh pemerintah pada bidang pendidikan ini maka akan semakin besar juga tingkat partisipasi sekolah pada daerah tersebut.

Sebelum desentralisasi, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia dilakukan terpusat dengan menggunakan negosiasi ke provinsi-provinsi. Ketika terjadi desentralisasi mengenai sektor pendidikan, secara implisit anggaran pendidikan dimasukkan kedalam alokasi anggaran pembangunan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang berbasis pada formula yang ditetapkan yakni berbasis pada potensi penerimaan dan kebutuhan fiskal suatu daerah (Trisnantoro, dkk, 2008). Akibatnya yang terjadi adalah secara praktis sektor pendidikan harus bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkan anggaran.

Salah satu kebijakan desentralisasi fiskal adalah daerah diberi wewenang menentukan anggaran belanja untuk daerah mereka masing-masing, sehingga fungsi pemerintah daerah di sektor pendidikan, yaitu harus merencanakan dan menganggarkan program pendidikan dan bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkannya. Salah satu risiko dari pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dari sudut pandang pembiayaan kesehatan terletak pada kemungkinan bahwa pemerintah daerah tidak akan memprioritaskan sektor pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Canterero et al (2008) di Spanyol dengan menginvestigasi secara empiris dengan hasil bahwa pendapatan per kapita, desentralisasi dan sumber daya kesehatan memiliki pengaruh penting terhadap kematian bayi dan usia harapan hidup. Angka kematian bayi dan usia harapan hidup berhubungan dengan pendapatan per kapita, desentralisasi pelayanan kesehatan, dan jumlah dokter umum. Dengan mengacu pada penelitian tersebut maka digunakanlah variabel PDRB per kapita sebagai bagian yang menentukan besarnya hasil atau *outcomes* yang ingin di capai untuk sektor pendidikan.

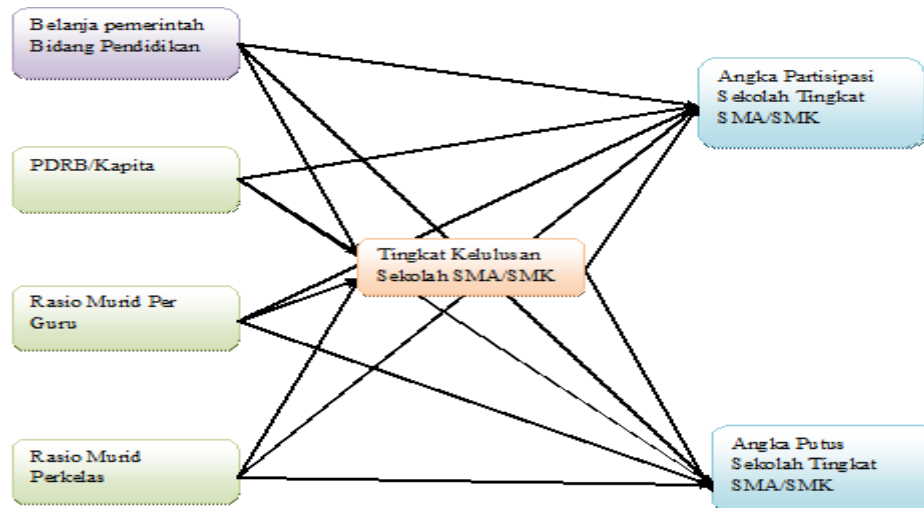
Penelitian yang dilakukan oleh Jean-Paul Faguet dan Fabio Sánchez (2006) dan Salinas Paula, Pena (2007) dengan mengambil studi kasus negara Bolivia serta Sepanyol mengungkapkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara rasio murid per guru untuk menggambarkan bagaimana ketersediaan guru di suatu daerah dengan tingkat partisipasi sekolah mempunyai hubungan yang positif yang berarti dengan tersedianya guru di suatu daerah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi sekolah.

H1 : Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap angka partisipasi sekolah

H2 : Desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap angka putus sekolah

- H3 : Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap angka kelulusan sekolah
H4: Angka kelulusan sekolah berpengaruh positif terhadap angka partisipasi sekolah
H5 : Angka kelulusan sekolah berpengaruh negatif terhadap angka putus sekolah

Gambar 1. Kerangka pemikiran teoritis



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa *outcomes* bidang pendidikan yang digunakan sebagai variabel dependen adalah angka partisipasi sekolah SMA/SMK, angka putus sekolah SMA/SMK. Sedangkan untuk variabel *intervening* atau *mediator* dipilih angka kelulusan sebagai indikator capaian output pendidikan. Variabel-variabel tersebut dipilih berdasarkan tingkat masalah pendidikan yang ada di Jakarta dan tujuan pembangunan daerah bidang pendidikan. Variabel desentralisasi fiskal di proksikan dengan realisasi belanja pemerintah kota dan kabupaten di Jakarta bidang pendidikan terhadap total belanja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu digunakan variabel control berupa PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku, variabel rasio murid per guru untuk menggambarkan tingkat kapasitas guru yang tersedia untuk memberikan pendidikan kepada siswa serta variabel rasio murid per kelas untuk melihat seberapa besar daya tampung pendidikan dalam menampung siswa dalam melaksanakan pendidikan. Data yang digunakan adalah data pada tiap kota kabupaten dimana Jakarta memiliki 5 kota dan 1 kabupaten dengan mengambil tahun penelitian selama lima tahun yaitu tahun 2006-2010.

Metode Analisis

Studi ini menggunakan analisis data panel (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan software AMOS 17. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara *time-series data* dan *cross-section data* (Gujarati, 2009). Data yang digunakan adalah data *time series* selama 5 tahun terakhir yakni tahun 2006-2010 dan data *cross section* sebanyak 6 data yang mewakili kabupaten / kota di Jakarta. Hasil dari kombinasi data *time series* dan *cross section* menghasilkan 30 observasi.

Untuk menggambarkan hubungan antara desentralisasi dengan besarnya angka partisipasi sekolah ini menggunakan pengembangan model yang di bangun oleh Paula Salinas Pena, dengan menggunakan variabel desentralisasi dan sumber daya pendidikan. Persamaan dalam model ini digunakan untuk mengetahui besar pengaruh variabel *intervening* atau variabel mediator yaitu rasio murid per kelas dalam mempengaruhi *outcome* bidang pendidikan

Metode *path analysis* atau analisis jalur digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel dependen dan variabel independen dengan menggunakan variabel mediator atau intervening. Paul Webley (1997) mengatakan analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Model analisis jalur yang di bangun dalam penelitian ini adalah:

$$AKSt = \alpha + \beta_1DFPt + \beta_2PDRBt + \beta_3MPGt + \beta_4MPKt + e$$

$$APSt = \alpha + \beta_1DFPt + \beta_2PDRBt + \beta_3MPGt + \beta_4MPKt + \beta_5AKSt + e$$

$$AParSt = \alpha + \beta_1DFPt + \beta_2PDRBt + \beta_3MPGt + \beta_4MPKt + \beta_5AKSt + e$$

Dimana :

DFP : Melambangkan indikator desentralisasi fiskal bidang pendidikan yakni realisasi belanja pemda dibidang pendidikan di APBD.

PDRB : Melambangkan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita berdasarkan harga yang berlaku.

MPG : Menggambarkan Rasio murid per guru.

MPK : Melambangkan Rasio Murid per Kelas.

AKS : Melambangkan tingkat kelulusan sekolah SMA/SMK.

AParS : Melambangkan indikator angka partisipasi sekolah SMA/SMK.

APS : Melambangkan indikator angka putus sekolah SMA/SMK..

e : Error

t : Melambangkan waktu dari tahun 2006-2010

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Belanja Daerah Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga pemenuhan akan kebutuhan hal tersebut menjadi tugas utama bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan penyedia pelayanan publik, karena pendidikan merupakan bagian dari fasilitas publik yang menjadi hak bagi setiap warga masyarakat.

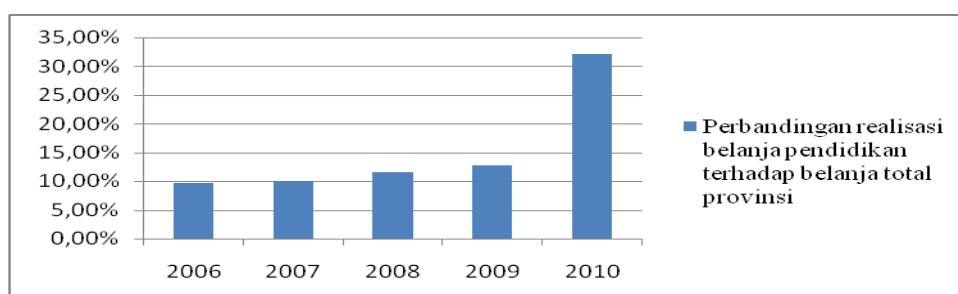
Untuk memenuhi pelayanan pendidikan yang telah di rencanakan pemerintah tersebut maka pemerintah melalui fungsi anggarannya mengalokasikan belanja pembangunan untuk sektor pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan itu nantinya akan di gunakan sebagai biaya operasional pelaksanaan pendidikan, dan biaya-biaya lain yang di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pendidikan tersebut.

Pemerintah melalui UUD sisdiknas pasal 49 ayat 1 (tentang pengalokasian dana pendidikan) telah memberikan aturan bahwa, alokasi anggaran pembangunan bidang pendidikan haruslah sebesar 20 persen dari total alokasi belanja daerah. Sehingga diharapkan dengan pemenuhan biaya pendidikan yang besar tersebut semua golongan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dan akses pada pendidikan yang diwujudkan dengan angka partisipasi sekolah dan angka putus sekolah serta mengurangi angka buta huruf yang masih menjadi masalah pada sebagian masyarakat Jakarta.

Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana besarnya fungsi desentralisasi dengan melihat perbandingan antara alokasi belanja daerah bidang pendidikan kota dan kabupaten dengan total alokasi belanja provinsi. Dapat dilihat dari tabel di bawah mengenai alokasi belanja pendidikan provinsi Jakarta sejak tahun 2006 sampai tahun 2010.

Gambar 2 menunjukkan perkembangan yang cukup baik mengenai alokasi belanja pembangunan bidang pendidikan, dimana setiap tahunnya alokasi belanja pendidikan untuk Provinsi DKI Jakarta semakin naik.

Gambar 2. Persentase Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pendidikan per Total Belanja Provinsi Tahun 2006-2010



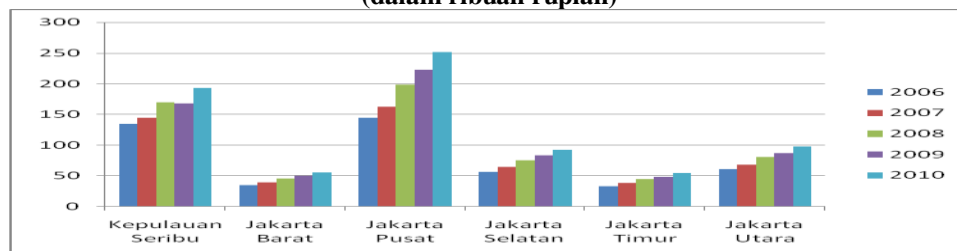
Sumber : Badan Pengelola Kekayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah

Bila dibandingkan dengan belanja pendidikan tahun sebelumnya memang terjadi lonjakan yang cukup besar pada tahun 2010 ini, hal ini berkaitan dengan penetapan kebijakan anggaran pendidikan 20 persen yang mulai di coba oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta.

PDRB per Kapita

PDRB perkapita merupakan perwujudan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah per tahun perkepala keluarga. Untuk kebutuhan penelitian ini yang digunakan adalah pendapatan regional bruto dengan harga berlaku. Karena disana akan melihat bagaimana kondisi pendapatan kotor masyarakat setelah terkena inflasi dan lain-lain.

Gambar 3. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kota Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006-2010 (dalam ribuan rupiah)



Sumber: Biro Pusat Statistik

Dari data pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa tingkat PDRB per kapita masyarakat DKI Jakarta mengalami kenaikan atau peningkatan tiap tahunnya dan jumlahnya cukup besar bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Ini menunjukkan tingkat kesejahteraan yang cukup baik pada masyarakat di Jakarta daripada provinsi-provinsi lain.

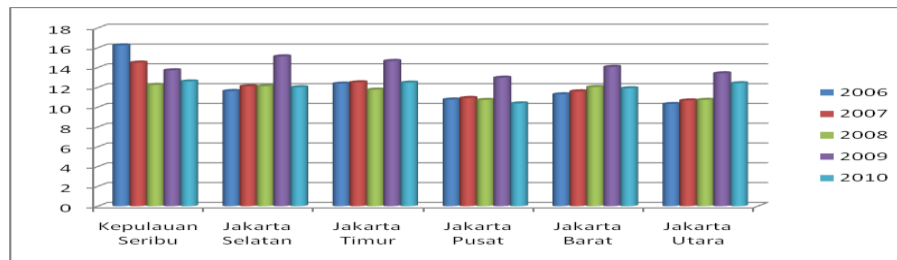
Untuk tingkat pendapatan perkapita terbesar berada pada daerah Jakarta pusat dimana pada tahun 2010 tercatat memperoleh pendapatan perkapita sebesar Rp 251.814.000 dan daerah dengan pendapatan tertinggi selanjutnya adalah kepulauan seribu dengan tingkat pendapatan perkapita sebesar Rp 192.767.000 . pendapatan perkapita yang cukup tinggi itu disebabkan oleh sumbangan pendapatan regional bruto dari sektor industri yang cukup besar dimana kita ketahui untuk daerah Jakarta pusat berkumpul perusahaan dan daerah perkantoran, sehingga dengan tingginya aktifitas ekonomi dan perputaran uang pada sektor tersebut menghasilkan sumbangan pendapatan yang tinggi.

Di daerah kepulauan seribu sumber pendapatan regional brutonya ditopang oleh pendapatan dari sektor pariwisatanya dimana kita ketahui kepulauan seribu merupakan salah satu objek wisata bahari yang cukup tinggi tingkat kunjungannya. Dengan semakin banyaknya tingkat kunjungan wisata pada daerah tersebut sehingga menghasilkan sumbangan pendapatan regional bruto yang cukup tinggi pula.

Rasio Murid Per Guru SMA/SMK

Rasio murid per guru merupakan bagian terpenting dalam faktor input pendidikan karena guru disini berperan selain sebagai faktor input pendidikan dan bagian dari sarana pendidikan yang di sediakan pemerintah namun guru juga berperan sebagai pendidik yang menentukan bagaimana kualitas murid dan *output* pendidikan lain baik dari segi akademis dan non akademis. Untuk melihat bagaimana kondisi penyediaan fasilitas publik berupa guru pada satuan pendidikan SMA/SMK di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Rasio Murid Per Guru Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006-2010



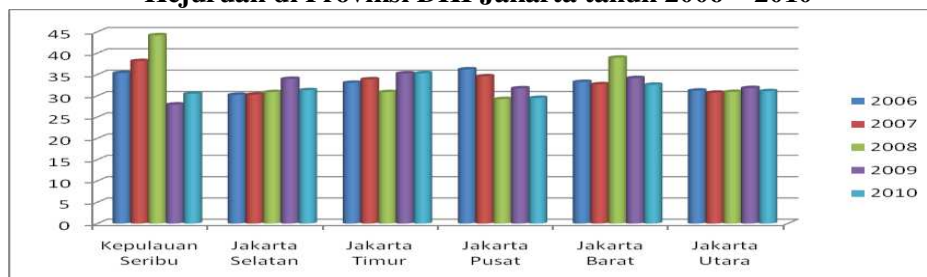
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, data diolah

Data pada Gambar 4 diatas menggambarkan data mengenai rasio jumlah murid per guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Provinsi DKI Jakarta. Dari nilai capaian atau indikator pelayanan minimal untuk penyediaan guru per murid adalah sebesar 11 murid per guru untuk tingkat satuan pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas rasio jumlah murid per guru pada tingkat sekolah menengah atas rasio murid per gurunya juga mengalami kondisi yang cukup baik, meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2006 sampai tahun 2008 angka rasio jumlah murid per guru rata-rata untuk provinsi DKI Jakarta sebesar 11.51 siswa per guru, 2009 jumlah rasio murid per gurunya naik menjadi 14,28 murid per guru. Pada tahun 2010 rasio murid per guru turun menjadi 11,98 murid per guru. Nilai rata-rata murid per guru tersebut hampir ideal pada tiap daerahnya dan cukup memenuhi capaian minimal pelayanan pendidikan yang di tetapkan pemerintah.

Rasio Murid Per Kelas SMA/SMK

Jumlah kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar merupakan wujud pemerintah dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Hal ini berkaitan dengan fasilitas fisik yang di sediakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menampung atau menyerap siwa untuk belajar. Ketersediaan ruang kelas untuk proses belajar mengajar. Untuk melihat bagaimana kondisi rasio murid per kelas untuk Provinsi DKI Jakarta ini dapat di lihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Rasio Murid Per Kelas Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 – 2010



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, data diolah

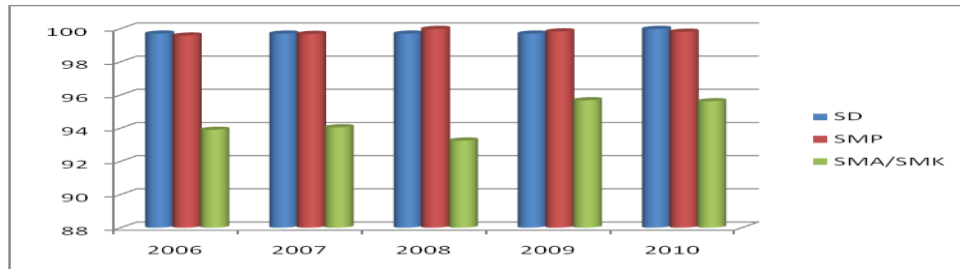
. Dalam peraturan menteri pendidikan tahu 2010 di tetapkan bahwa jumlah peserta didik yang baik dalam setiap kelas adalah 32 sampai 36 siswa per kelas. Bila di lihat pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang dapat di tampung dalam ruang kelas yang tersedia di Provinsi DKI Jakarta cukup memadai karena masih berada pada batas jumlah siswa yang di anjurkan dan di tetapkan oleh pemerintah. Namun pada tahun 2008 pada daerah Kepulauan Seribu rasio murid perguru mencapai angka 44,22 dimana cukup banyak siswa yang mengisi satu kelas. Namun untuk tahun selanjutnya angka rasionya cukup ideal.

Tingkat Kelulusan Sekolah SMA/SMK

Tingkat kelulusan merupakan salah satu *output* pendidikan yang di canangkan oleh pemerintah daerah dalam rencana kerja perangkat daerahnya, dimana termasuk di ambil dari rencana strategis dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Tingkat kelulusan sekolah selama tahun

2006 sampai tahun 2010 cenderung stabil tanpa mengalami banyak perubahan, terutama penurunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah.

Gambar 6. Angka Kelulusan Sekolah SMA/SMK di Provinsi DKI Jakarta tahun 2006-2010 (Persen)



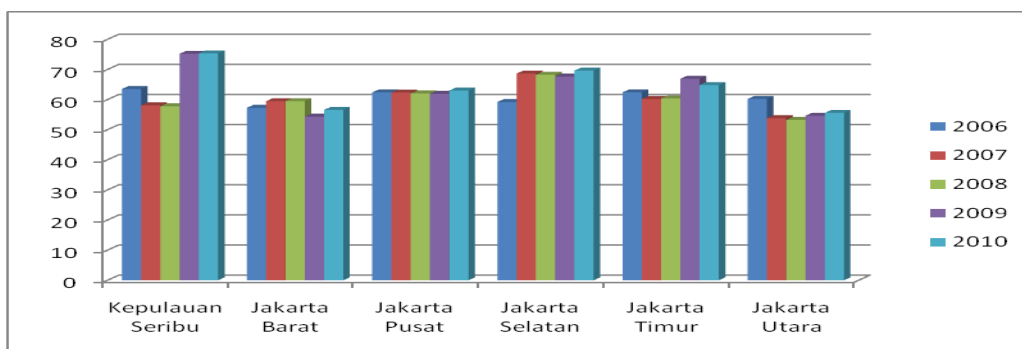
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Apabila kita lihat bila dibandingkan dengan tingkat kelulusan SD dan SMP tingkat kelulusannya sebesar 98% namun untuk tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan tingkat kelulusannya lebih kecil sebesar 93% sampai 95 persen. Untuk tingkat kelulusan SMA ini cukup rendah dan ini merupakan masalah yang cukup besar yang harus di tangani oleh pemda DKI karena bagaimanapun ini merupakan bagian dari pembentukan sumber daya manusia yang baik dan berdaya guna. Walaupun memang program wajib belajar hanya sampai sembilan tahun namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya yaitu pada jenjang sekolah menengah atas juga perlu diperhatikan agar mutu sumber daya manusia dapat terus berkembang, terutama di provinsi DKI Jakarta.

Angka partisipasi sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan cara yang digunakan untuk melihat perbandingan jumlah penduduk pada usia sekolah tertentu dan yang sedang bersekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada usia tersebut. Semakin besar angka partisipasi sekolah maka semakin besar juga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pendidikan yang berarti juga semakin banyak masyarakat yang bersekolah.

Gambar 7. Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SMA/SMK di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006-2010



Sumber : Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta

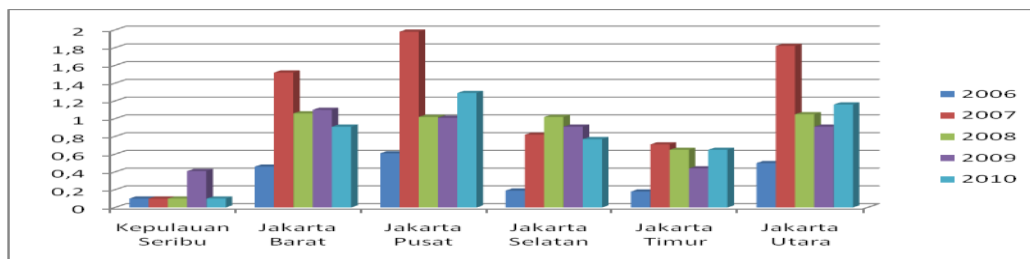
Gambar 7 menyajikan data mengenai angka partisipasi sekolah untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan di Provinsi DKI Jakarta. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk tingkat pendidikan sekolah menengah memiliki rata-rata sebesar 60%. Dan untuk tiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. Daerah yang memiliki angka partisipasi yang cukup rendah yaitu Jakarta barat dimana rata-rata partisipasi sekolah belum mencapai angka 60% dan daerah Jakarta Utara dimana pada tahun 2006 angka partisipasinya cukup tinggi namng pada tahun berikutnya mengalami penurunan dengan tingkat partisipasi sebesar 53% sampai 55%. Untuk tingkat partisipasi sekolah yang cukup tinggi berada pada daerah Kepulauan Seribu dimana pada tahun 2009 dan 2010 tingkat partisipasi sekolah di daerah tersebut sebesar 75%. Dan pada daerah Jakarta Selatan untuk tingkat partisipasi sekolahnya sebesar 69,64% pada tahun 2010.

Bila melihat kondisi partisipasi sekolah untuk tingkat sekolah menengah atas kondisinya cukup memprihatinkan karena dengan angka sebesar itu menandakan besarnya penduduk usia SMA/SMK yang mendaftar untuk jenjang pendidikan tersebut cukup rendah yang di harapkan adalah bahwa setiap penduduk dapat berpartisipasi dalam pendidikan. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah.

Angka Putus Sekolah SMA/SMK

Angka putus sekolah merupakan besarnya siswa yang putus sekolah atau berhenti sekolah pada tingkat satuan pendidikan tertentu hal tersebut merupakan hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah karena keberlangsungan pendidikan sampai dengan 12 tahun merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai *service provider* bidang pendidikan.

Gambar 8. Angka Putus Sekolah tingkat SMA/SMK di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006-2010



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Gambar 8 menyajikan data angka putus sekolah di provinsi DKI Jakarta. Tabel diatas menunjukkan angka putus sekolah yang cukup besar untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas. seperti pada tahun 2007 tingkat putus sekolah di Provinsi Jakarta cukup tinggi di mana pada daerah Jakarta Pusat tingkat putus sekolah mencapai angka 1,98% dan pada daerah Jakarta Utara angka putus sekolah mencapai angka 1,82%. Selain pada tahun 2007, tahun 2010 juga mengalami peningkatan angka putus sekolah yang cukup besar seperti pada daerah Jakarta pusat mencapai angka 1,29% dan pada daerah Jakarta Utara angka putus sekolah pada tahun 2010 mencapai angka 1,16%. Hal tersebut kedepannya perlu dibenahi apabila ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Outlier

Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis jalur adalah asumsi multi-variate normal, tidak adanya multikolinearitas atau singularitas dan outlier. Serta uji goodness of fit untuk melihat kesesuaian antara data dengan model

Uji Normalitas

Normalitas dari data merupakan salah satu syarat dalam pemodelan Analisis Jalur. Pengujian normalitas ditekankan pada data multivariat dengan melihat nilai skewness, kurtosis, an secara statistik dapat dilihat dari nilai Critical Rasio (CR). Jika digunakan tingkat signifikansi ebesar 5 persen, maka nilai CR yang berada di antara -1,96 sampai dengan 1,96 ($-1,96 \leq CR \leq 1,96$) dikatakan data berdistribusi normal, baik secara univariat maupun multivariat. Hasil secara lengkap mengenai pengujian normalitas data pada seluruh variabel penelitian dapat dilihat pada Lampiran. Pada Lampiran, nilai CR multivariat sebesar -0,325 dan nilai ini terletak didalam range antara -1,96 sampai dengan 1,96, sehingga dapat dikatakan bahwa data multivariat normal.

Uji multikolinearitas atau singularitas

Multikolinearitas dapat dilihat melalui deter-minan matriks kovarians. Dalam penelitian kali ini digunakan koefisien korelasi antar variabel independent untuk menguji ada tidaknya masalah mutikolinearitas pada model. Apabila koefisien korelasi antar variabel independent melebihi 0.80 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah multikolinearitas. Karena terdapat variabel independen yang memiliki korelasi yang kuat terhadap variabel independen lainnnya. Karena dalam penelitian ini tidak terdapat korelasi antar variabel melebihi 0,8 maka tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam penelitian ini.

Uji Goodness of fit

Untuk melihat kesesuaian model untuk menjawab hipotesis yang di buat maka dilakukan uji-uji berikut. Bila nilai hitungnya sesuai dengan nilai *cut-off* maka dapat dikatakan model yang di bangun telah sesuai (fit). Hasil perhitungan uji *goodness of fit* model adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen

Kriteria	nilai cut off	hasil perhitungan
Chi-square	diharapkan kecil	2.500
Probability level	≥ 0.05	0.114
GFI	≥ 0.90	0.977
IFI	mendekati 1.0	0.980
AIC	\leq independence model	$56.500 \leq 89.899$
BCC	\leq independence model	$77.072 \leq 95.232$
BIC	\leq independence model	$94.333 \leq 99.707$
Critical N	Max 45	N = 30

Sumber : Output AMOS 16

Pada kriteria fit model ini terpenuhi dari semua criteria goodness of fit pada model tersebut terpenuhi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa model di terima dan terdapat kesesuaian antara data dengan model.

Uji Hipotesis Analisis Jalur

Uji Koefisien t

Uji koefisien t menunjukkan pengaruh masing-masing variabel-variabel independen terhadap *outcomes* bidang pendidikan. Ringkasan hasil perhitungan pengaruh desentralisasi fiskal (DFP) terhadap *outcomes* bidang pendidikan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil pengujian estimasi model

Variabel	Estimate	Prob.	Variabel	Estimate	Prob.
logAKS <--- logDFP	0,008	(***)*	logAParS <--- logPDRB	0,052	0,146
logAKS <--- logPDRB	0,009	(***)*	logAParS <--- logMPG	0,339	(0,078)**
logAKS <--- logMPG	0,057	(***)*	logAParS <--- logMPK	-0,315	(0,071)**
logAKS <--- logMPK	-0,017	0,216	logAPS <--- logDFP	0,547	(0,014)*
logAParS <--- logAKS	-1,125	0,630	logAPS <--- logPDRB	0,241	0,407
logAPS <--- logAKS	-2,412	0,899	logAPS <--- logMPG	-1.507	0,337
logAParS <--- logDFP	0,013	0,640	logAPS <--- logMPK	-0,979	0,491

Sumber : Output Amos 17

(*) = Signifikan pada α 5%

(**) = Signifikan pada α 10%

Pengaruh Antarvariabel Penelitian

Model pendidikan

Hasil yang di dapat dengan menggunakan AMOS 16 untuk melihat hasil permodelan dari pengaruh desentralisasi terhadap *outcomes* bidang pendidikan dengan menggunakan analisis jalur adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung Dan Total Desentralisasi Fiskal Terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan

	Variabel	DFP	MPK	MPG	PDRB	AKS
Pengaruh Langsung	AKS	,008	-,017	,057	,009	,000
	APS	,547	-,979	-1,507	,241	-2,412
	AParS	,013	-,315	,339	,052	-1,125
	Variabel	DFP	MPK	MPG	PDRB	AKS
Pengaruh Tidak Langsung	AKS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	APS	-0,020	0,040	-0,137	-0,021	0,000
	AParS	-0,009	0,019	-0,064	-0,010	0,000
	Variabel	DFP	MPK	MPG	PDRB	AKS
Pengaruh Total	AKS	,008	-,017	,057	,009	,000
	APS	,527	-,938	-1,644	,220	-2,412
	AParS	,003	-,296	,275	,042	-1,125

Sumber : output AMOS 16

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap *Outcomes* Bidang Pendidikan

Hasil pengolahan data mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap *outcomes* bidang pendidikan di provinsi DKI Jakarta seperti yang di tunjukkan pada tabel 2 memiliki hasil yang cukup baik terhadap pengaruh desentralisasi fiskal yang diwakili dengan realisasi belanja bidang pendidikan yang telah di alokasikan oleh pemerintah daerah terhadap *outcomes* pada bidang pendidikan yang pada penelitian ini *outcomes* pendidikan yang ingin di teliti adalah angka partisipasi sekolah dan angka putus sekolah.

Berdasarkan hasil diatas terbukti bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah. Angka putus sekolah menghasilkan nilai koefisien dengan pengaruh hubungan positif. Hal tersebut cukup berbeda dengan teori dan penelitian yang dilakukan oleh salina, paula (2007) Jean-Paul Faguet & Fabio Sánchez (2006) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan memperbaiki *outcomes* bidang pendidikan berupa angka melanjutkan sekolah.

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 2 di temukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan namun dengan tanda yang positif. Hal tersebut menandakan bahwa dengan meningkatnya desentralisasi yang di wakili dengan belanja pemerintah pada bidang pendidikan belum memberikan hasil yang baik karena angka putus sekolah juga ikut meningkat seiring dengan kenaikan belanja pemerintah.

Meningkatnya angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah ini dapat di sebabkan oleh program-program pembiayaan pendidikan yang belum sampai pada tingkat sekolah menengah atas, seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan biaya-biaya pendidikan lainnya. Program-program pembiayaan pendidikan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar dan menengah pertama.

Selain faktor pembiayaan dan program pemerintah juga ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hal ini salah satunya adalah faktor ekonomi berupa tingkat pendapatan orang tua murid yang bersangkutan. Hal tersebut dapat juga mempengaruhi tingkat putus sekolah, seperti yang telah di jelaskan pada awal bab empat dimana tingkat pendapatan perkapita masyarakat Jakarta memang cukup tinggi, namun dapat dilihat juga bahwa tingkat kemiskinan di Jakarta juga cukup tinggi hal tersebut bertolak belakang dengan tingkat pendapatan perkapita yang tinggi sehingga tingkat putus sekolah yang tinggi dapat dikaitkan dengan tingkat pendapatan masyarakat atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain faktor-faktor yang tersebut pengaruh ini juga berkaitan dengan hubungan statistik dimana angka belanja pemerintah yang semakin tinggi dan juga angka putus sekolah yang semakin tinggi sehingga hubungan tersebut bersifat positif.

Dalam penelitian ini memang tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara pendapatan perkapita dengan tingkat putus sekolah, namun pendapatan perkapita bisa saja

dikaitkan karena memang tingkat pendapatan seseorang berpengaruh untuk membiayai pendidikan putra atau putrinya. Selain itu juga apabila tingkat pendapatan keluarganya kecil, siswa atau siswi tersebut akan cenderung membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mereka memilih untuk berhenti sekolah.

Dengan mengetahui hasil tersebut maka pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kondisi yang terjadi pada tingkat sekolah menengah atas ini karena dengan semakin membaiknya kondisi *outcome* pendidikan tersebut seharusnya akan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Untuk memperbaiki angka putus sekolah tersebut yaitu dengan memperbaiki kinerja pengelolaan anggaran pemerintah ataupun dengan memperhatikan kondisi sekolah menengah keatas dengan memberikan program wajib belajar hingga 12 tahun. Faktor pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat dan faktor-faktor non ekonomi lainnya perlu diperhatikan agar keberlangsungan pendidikan setiap penduduk di Provinsi DKI Jakarta dapat didapatkan dengan baik.

Dalam pengolahan data menggunakan analisis jalur ini dapat dilihat efisiensi desentralisasi fiskal terhadap *outcome* pendidikan pengaruh langsung dan tidak langsung dari desentralisasi fiskal. Hasil pengolahan seperti yang terlihat pada tabel 2. Variabel desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap angka kelulusan sekolah SMA/SMK. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Salinas, Paula(2007) dan Jean Faguet-Sanches (2006). Dengan mengetahui hal tersebut maka untuk kedepannya diperlukan peningkatan anggaran pendidikan agar tingkat kelulusan sekolah semakin tinggi setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini pengaruh variabel *output* berupa angka kelulusan sekolah SMA/SMK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *outcome* pendidikan berupa angka partisipasi sekolah SMA/SMK dan angka putus sekolah SMA/SMK. Dalam penelitian ini angka kelulusan sekolah SMA/SMK didapat tidak mempengaruhi *outcome* pendidikan secara signifikan hal tersebut kemungkinan disebabkan karena tingkat kelulusan sekolah yang diteliti dalam penelitian ini adalah pada tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan yang dalam artian objek yang diteliti adalah siswa yang telah selesai mengikuti kegiatan belajar di sekolah, sedangkan *outcomes* pendidikan yang di teliti berupa angka partisipasi sekolah dan angka putus sekolah. Semua variabel itu menggambarkan tentang kondisi siswa yang sedang melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Sehingga hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Selain itu pada hubungan tingkat kelulusan SMA/SMK dengan siswa putus sekolah karena memang siswa yang putus sekolah itu tidak masuk dalam perhitungan siswa yang mengikuti ujian. Sehingga hubungan antara kedua variabel tersebut diperoleh tidak berpengaruh secara signifikan.

Variabel kontrol yang terbukti memiliki pengaruh dalam *outcomes* bidang pendidikan ini antara lain rasio murid per guru dan tingkat PDRB perkapita masyarakat. PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap tingkat kelulusan sekolah. PDRB per kapita menandakan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar. Sesuai dengan penelitian ini, hal tersebut menandakan bahwa dengan semakin tingginya pendapatan seseorang yang tentu juga meningkatkan kesejahteraaannya maka akan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan taraf pendidikannya. Peningkatan kesadaran tersebut meliputi kesadaran untuk terus belajar sehingga dapat lulus sekolah.

Variabel rasio murid per guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap angka partisipasi sekolah tingkat sekolah menengah atas. Hal ini membuktikan bahwa apabila semakin banyak siswa yang berpartisipasi dalam pendidikan atau dengan kata lain mendaftar untuk mengenyam pendidikan maka beban tanggungan guru akan semakin bertambah. Hal tersebut menandakan bahwa akan semakin banyak murid yang harus di kontrol oleh seorang guru. Namun bagaimanapun siswa yang ingin berpartisipasi dalam pendidikan memang harus diutamakan, sebab pendidikan menjadi syarat mutlak dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Hal kedepan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan jumlah guru yang ada agar beban tanggungan guru pada tingkat ini dapat terus berkurang, sehingga kontrol pendidikan juga akan semakin baik. Rasio murid per guru juga berpengaruh signifikan terhadap angka kelulusan sekolah yang menggambarkan bahwa bila beban tanggungan guru meningkat maka tingkat kelulusan sekolah juga akan meningkat.

Untuk variabel kontrol pendidikan yaitu rasio murid per kelas menggambarkan tentang kapasitas fasilitas pendidikan berupa ruang kelas dalam menyerap murid yang ingin bersekolah.

Dari hasil pengujian estimasi pengaruh rasio murid per kelas untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan ini ditemukan hasil bahwa rasio murid per kelas berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah dengan hubungan negatif. Hal tersebut menggambarkan bahwa dengan meningkatnya beban tanggungan ruang kelas dalam menampung siswa dalam belajar semakin meningkat maka akan mengurangi tingkat partisipasi murid dalam sekolah. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang harus di atasi oleh pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Karena fasilitas penunjang pendidikan seperti ruang kelas untuk mengajar ini juga merupakan bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan pelayanannya. Karena bagaimanapun partisipasi murid dalam pendidikan tidak bisa di batasi oleh minimnya ruang kelas yang tersedia. Semakin besar partisipasi murid dalam pendidikan maka perhatian pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ini juga harus ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan kapasitas daya tampung pendidikan seperti penyediaan ruang kelas

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, di dapat bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap *outcomes* pendidikan. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap angka kelulusan sekolah, sehingga hal ini menjawab hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Desentralisasi fiskal juga ditemukan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat putus sekolah siswa, berbeda dengan hipotesis penelitian. Untuk pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka partisipasi sekolah. Pengaruh yang dihasilkan ditemukan tidak signifikan. *Output* pendidikan berupa tingkat kelulusan sekolah SMA/SMK belum memberikan hasil pengaruh yang signifikan terhadap *outcomes* pendidikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian ini. Pada pengujian analisis jalur ditemukan bahwa tingkat kelulusan memiliki nilai koefisien atau pengaruh terhadap *outcomes* pendidikan melalui analisis langsung. Namun tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan data *time series* yang lebih panjang agar variasi yang didapat semakin banyak. Kemudian disarankan untuk menggunakan tahun dengan data yang sudah bersifat tetap, menghindari data yang masih bersifat sementara.

REFERENSI

- Ahmad, Afridian. 2010. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Bidang Kesehatan Studi Empiris Di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat*. Padang. Jurnal ekonomi akuntansi Hal 17-19, Vol. 6, No. 1
- Asfaw, A., Frohberg, K., James, K. S., and Jütting, J. 2007. *Fiscal Decentralization and Health Outcomes: Empirical Evidence From Rural India*. Journal of Developing Areas, Fall 2007.
- Barata, Atep Adya. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia
- Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta*. Berbagai edisi penerbitan. Jakarta: BPS DKI Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta*. Berbagai edisi penerbitan. Jakarta: BPS DKI Jakarta
- Badan Pusat Statistik. *Jakarta Dalam Angka*. Berbagai edisi penerbitan. Jakarta: BPS DKI Jakarta
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Nota Keuangan APBD Provinsi DKI Jakarta*. Berbagai tahun terbitan. Jakarta: BPKD DKI Jakarta
- Bastian. 2006. *Sistem Penganggaran pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba
- Emelia, 2006. *Mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendorong Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: UII
- Ferdinand, Augusty. 2007. *Structural equation modeling dalam penelitian manajemen*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2008. *Model persamaan struktural, konsep, dan aplikasi dengan Amos 16*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometric*. New York: The McGraw Hill Companies Inc

- Mangkoesoebroto, Guritno. 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muhammad Iqbal Lubekran. 2007. *Analisa Dampak Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Perkembangan Daerah di Indonesia Periode 2001-2004*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Oates, W.E. 1993. *Fiscal Decentralization And Economic Development*, National Tax Journal
- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa - Bali)*. Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Bappeda DKI. 2011. *Rencana Kerja Perangkat Daerah 2012*. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Salinas, Paula,. 2007. *Evaluation Of Effects Of Decentralization On Educational Outcomes In Spain*. Institutd'economia de Barcelona
- Sasana, Hadi,. 2009. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10, No.1, Hal.103-124
- S, Yogi., Ikhsan, M. 2006. *Standar Pelayanan Publik di Daerah*. Handbook Manajemen Pemerintahan Daerah. Makasar: PKKOD-LAN